AKSI DEMO DI JAKARTA DAN DAERAH: MENANGGAPI KEMATIAN PENGEMUDI OJEK ONLINE DAN KEKERASAN APARAT

Oleh

EVAN FAWAZ PRATAMA

2416041126

Reguler D

ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aksi demonstrasi yang terjadi di Jakarta dan berbagai daerah pada Agustus 2025 menjadi salah satu peristiwa paling dramatis dalam dinamika sosial-politik Indonesia kontemporer. Pemicunya adalah kematian tragis Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online berusia 21 tahun, yang terlindas kendaraan taktis (rantis) Brigade Mobil (Brimob) saat mengikuti aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta Pusat, pada 28 Agustus 2025. Insiden ini terjadi ketika demonstrasi yang awalnya damai berubah menjadi ricuh menjelang waktu maghrib. Aparat kepolisian, yang didukung oleh ribuan personel gabungan dari berbagai unsur seperti TNI, Satpol PP, dan Dishub, berusaha membubarkan massa yang belum bubar sesuai ketentuan waktu. Dalam keadaan ini, sebuah rantis milik Brimob melaju kencang di tengah kerumunan massa tanpa mengindahkan keselamatan para demonstran. Affan yang berada di tengah jalan terjatuh dan terlindas kendaraan tersebut, yang kemudian meneruskan perjalanannya hingga meninggalkan korban tergeletak tanpa pertolongan segera. Peristiwa ini terekam dalam video viral yang memicu gelombang kemarahan publik dan kecaman dari berbagai kalangan (Tempo, 2025; Katadata, 2025; Suarasurabaya.net, 2025).

Kematian Affan Kurniawan tidak hanya menjadi tragedi personal, tetapi juga menjadi simbol ketegangan konflik sosial yang melibatkan kelompok pekerja informal, dalam hal ini pengemudi ojek online, yang selama ini menghadapi berbagai tantangan dalam sistem ekonomi dan regulasi pekerjaan mereka. Demonstrasi tersebut sendiri merupakan ekspresi protes atas ketidakadilan yang dialami seperti adanya pungutan tidak adil dari perusahaan aplikasi, minimnya perlindungan sosial, dan tuntutan atas kesejahteraan yang lebih baik. Di samping itu, insiden kekerasan aparat yang terkesan berlebihan dalam penanganan massa menunjukkan betapa aparat keamanan cenderung menggunakan pendekatan represif yang mengabaikan penghormatan hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. Gas air mata yang ditembakkan hingga ke lantai sepuluh Rumah Susun Bendungan Hilir menambah bukti pendekatan keterlaluan aparat dalam menindak unjuk rasa (UM Surabaya, 2025; Amnesty International Indonesia, 2025).

Selain Affan, pengemudi ojol lain yang juga terlindas rantis Brimob, Moh Umar Amarudin, mengalami luka-luka serius dan masih menjalani perawatan intensif. Ini menunjukkan bahwa kekerasan aparat bisa berakibat fatal dan mencederai kehidupan warga sipil, yang seharusnya dilindungi negara. Tujuh anggota Brimob telah diperiksa terkait kejadian ini, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun telah menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada keluarga korban dan komunitas ojek online. Namun, tekanan publik menuntut transparansi penuh dan pertanggungjawaban yang nyata dari aparat serta pemerintah atas insiden ini agar tidak terulang kembali (BBC Indonesia, 2025; CNBC Indonesia, 2025).

Selain aspek hukum dan keamanan, peristiwa ini memperlihatkan kegagalan pemerintah dan aparat dalam mengelola ketegangan sosial melalui dialog dan pendekatan preventif. Kericuhan yang terjadi, yang melibatkan lemparan batu dari demonstran dan tembakan gas air mata dari aparat, mempertegas bahwa ketegangan ini adalah akibat dari masalah struktural yang belum terselesaikan di tingkat pengelolaan kebijakan tenaga kerja informal dan penegakan hak asasi manusia. Solidaritas yang muncul dari komunitas ojek online dan massa aksi di berbagai kota seperti Sukabumi yang juga menggelar unjuk rasa menuntut keadilan menandakan bahwa keresahan ini telah menyebar luas ke berbagai daerah (Detik, 2025; Kontras, 2025).

Lebih jauh, peristiwa ini membuka ruang diskusi yang mendalam mengenai fungsi dan batas kekerasan negara dalam konteks demokrasi yang sehat. Kejadian kekerasan ini harus dipandang sebagai peringatan serius bagi negara Indonesia untuk mengevaluasi sistem penegakan hukum dan keamanan publiknya. Sebaliknya, masyarakat sipil, khususnya kelompok pekerja informal seperti pengemudi ojek online, menuntut perlindungan yang tidak hanya secara formal diatur tetapi juga diterapkan secara nyata agar keselamatan dan hak-hak mereka terjaga dalam setiap proses demokrasi dan konfrontasi sosial (Komnas Perempuan, 2025; Amnesty International Indonesia, 2025).

Studi tentang kasus ini penting untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang bagaimana dinamika antara kekuasaan negara dan masyarakat sipil berlangsung di Indonesia saat ini. Pendekatan sosiologis, hukum, dan politik akan bisa menganalisis tidak hanya soal peristiwa kekerasan badan hukum aparat, tetapi juga akar masalah sosial-ekonomi yang melatarbelakangi aksi demonstrasi pengemudi ojek online tersebut. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi

landasan untuk rekomendasi reformasi kebijakan yang lebih inklusif, humanis, dan berkeadilan sosial.

Demonstrasi yang berlangsung di Jakarta dan sejumlah daerah pada bulan Agustus 2025 seorang momen kritis dalam sejarah sosial-politik Indonesia khususnya terkait perjuangan pengemudi ojek online. Peristiwa ini dipicu oleh kematian tragis Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi demonstrasi di depan Gedung DPR pada tanggal 28 Agustus 2025. Kronologi kejadian menunjukkan bahwa saat upaya pembubaran massa, rantis yang dikendarai aparat melaju di tengah kerumunan sehingga menyebabkan Affan terjatuh dan terlindas sampai meninggal dunia. Kejadian ini terekam dan tersebar luas, menimbulkan kemarahan mendalam dari masyarakat, pengemudi ojek online, organisasi sosial, dan aktivis hak asasi manusia di seluruh Indonesia hingga mancanegara. Tekanan kepada aparat kepolisian meningkat untuk bertanggung jawab dan transparan dalam menangani insiden tersebut (Tempo, 2025; Katadata, 2025; BBC Indonesia, 2025).

Aksi demo ini sendiri merupakan ungkapan dari ketidakpuasan yang mendalam terhadap kondisi kerja pengemudi ojek online. Para pengemudi selama ini menghadapi berbagai tantangan seperti potongan komisi yang tidak adil, praktik algoritma yang tidak transparan, minimnya perlindungan sosial, dan tekanan ekonomi yang semakin berat. Demonstrasi mereka bukan hanya tuntutan ekonomi, tetapi juga manifestasi perjuangan hak pekerja dalam sektor informal yang menjadi tulang punggung transportasi perkotaan. Ratusan ribu pengemudi ojol tersebar di kota-kota besar Indonesia melakukan aksi yang juga berdampak besar secara ekonomi, dengan estimasi kerugian transaksi hingga ratusan miliar rupiah dalam sehari selama aksi demo berlangsung (Disway, 2025; Merdeka, 2025; Tirto.id, 2025).

Namun, penanganan unjuk rasa tersebut oleh aparat seringkali bersifat represif, dengan penggunaan kekuatan berlebihan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kasus kekerasan hingga ekstrayudisial killing seperti dialami Affan. Aparat keamanan yang seharusnya menjadi pelindung keamanan publik, dalam kasus ini justru menjadi sumber teror dan ketakutan. Protes tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga merambah ke kota-kota lain seperti Sukabumi, Pontianak, dan Makassar, dimana komunitas pengemudi ojek online menuntut keadilan dan penghentian kekerasan dari aparat (Amnesty International, 2025; Komnas Perempuan, 2025).

Dampak sosial dari demonstrasi ini sangat luas. Tidak hanya mempengaruhi pengemudi ojek online, tetapi juga masyarakat umum yang bergantung pada layanan transportasi daring untuk mobilitas sehari-hari. Penutupan layanan secara massal memberikan dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi, seperti penurunan pendapatan para pelaku UMKM, warung makan, dan sektor jasa lainnya. Para pengemudi pun merugi secara ekonomi meskipun aksi tersebut merupakan perjuangan demi kesejahteraan jangka panjang (CNBC Indonesia, 2025; Tirto.id, 2025).

Selain itu, insiden ini juga membuka diskursus serius tentang legitimasi penggunaan kekerasan negara dalam menjaga ketertiban dan bagaimana hak asasi manusia dilindungi dalam konteks demokrasi. Kejadian ini mempertegas perlunya reformasi kebijakan pengamanan demonstrasi yang mengedepankan dialog dan perlindungan terhadap hak pekerja serta masyarakat sipil. Studi ini penting untuk memahami secara komprehensif dinamika konflik antara masyarakat sipil yang menuntut keadilan dan aparat yang bertugas menjaga keamanan, serta dampaknya terhadap stabilitas sosial-politik Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa penyebab utama kematian pengemudi ojek online dalam aksi demo di Jakarta dan daerah?
2. Bagaimana pola dan modus kekerasan aparat selama penanganan aksi demonstrasi pengemudi ojek online di tahun 2025?
3. Bagaimana persepsi komunitas pengemudi ojek online dan masyarakat umum terhadap insiden kekerasan aparat?
4. Apa dampak sosial dan politik dari kejadian ini terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia?
5. Bagaimana dampak ekonomi dari aksi demonstrasi pengemudi ojek online terhadap para pengemudi dan pelaku usaha kecil?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan penyebab serta kronologi kematian pengemudi ojek online.

2. Menganalisis praktik kekerasan aparat dalam penanganan demonstrasi pengemudi ojek online.
3. Menggali persepsi komunitas pengemudi ojek online dan masyarakat terhadap insiden dan penanganan aparat.
4. Menganalisis dampak sosial-politik insiden terkait demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia.
5. Mengkaji dampak ekonomi yang dialami pengemudi dan pelaku usaha kecil akibat aksi demo.

1.4 Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis: Menambah wawasan akademik dalam kajian konflik sosial, kekerasan aparat, dan hak asasi manusia serta ekonomi kerja informal di Indonesia.
- Manfaat Praktis: Memberikan rekomendasi bagi aparat keamanan, pemerintah, dan pelaku industri transportasi daring untuk penanganan unjuk rasa yang humanis, transparan, dan adil.
- Manfaat Sosial: Meningkatkan kesadaran publik atas pentingnya perlindungan hak pekerja informal dan akuntabilitas penegak hukum serta mendorong kebijakan yang melindungi keberlangsungan ekonomi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Fania Darma Amajida. 2016. *Kreativitas Digital Dalam Masyarakat Risiko Perkotaan: Studi Tentang Ojek Online "Go-Jek" di Jakarta*. Universitas Indonesia.

Amnesty International Indonesia. 2025. *Laporan Pelanggaran HAM oleh Aparat dalam Pengamanan Demonstrasi di Indonesia*. Jakarta: Amnesty Indonesia.

Satria Unggul Wicaksana. 2025. *Hukum dan HAM: Ekstra Yudisial Killing dan Implikasinya di Indonesia*. Surabaya: UMSurabaya Press.

Idrus, Wahyuni. 2024. "Tindak Pidana Penganiayaan oleh Pengemudi Ojek Konvensional terhadap Pengemudi Transportasi Online". *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1.

Komnas Perempuan. 2025. "Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Kekerasan Aparat dalam Aksi Demo 25 dan 28 Agustus 2025". *Jurnal HAM Indonesia*.

Harly Adam Budyanto. 2021. "Tindakan Sosial dalam Konflik antara Ojek Konvensional dan Ojek Online di Universitas Indonesia". *Jurnal Studi Sosial dan Politik*.